



## **DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PERAN PENDAMPING DESA SEBAGAI MODERASI**

**Achmad Subehan<sup>1</sup>**

**Harnovinsah<sup>2</sup>**

**Nurmala Ahmar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila

Email : subehan@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila

Email : dr.harnovinsah@univpancasila.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila

Email : nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id

**Diterima:** 17 Mei 2024

**Direview:** 22 Juli 2024

**Dipublikasikan:** 8 Agustus 2024

### ***Abstract***

*The government has developed a village financial system application (Siskeudes) as a tool to assist villages in achieving financial accountability. The operation of this application requires training and mentoring. The government also provides village mentoring, which is currently offered by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. This research aims to analyze the factors that influence the quality of village government financial reports in Kediri Regency with the professional village facilitator as a moderating variable. These factors are Understanding of Government Accounting Standards, Implementation of Village Financial System Application (Siskeudes), and The professional Village Facilitator. This research is a quantitative research using primary data through distributing questionnaires. The population and sample in this research were the village secretaries or village finance officers in the Kediri Regency. The survey was conducted on 100 respondents in 100 villages out of 343 villages in Kediri Regency. Data were analyzed using Structural Equation Modeling using WarpPLS 7.0 software. The results showed that understanding of government accounting standards, village financial system application (Siskeudes), and the professional village facilitators significantly affected the quality of village government financial reports. The professional village facilitator can moderate the influence between understanding of government accounting standards and village financial systems application (Siskeudes) on the quality of village government financial reports.*

**Keywords:** *Understanding of Government Accounting Standards, Implementation of Village Financial System Application (Siskeudes) and The Professional Village Facilitator, Village Government Financial Reports*

### ***Abstrak***

Pemerintah mengembangkan sebuah aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sebagai alat untuk membantu desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Pengoperasian aplikasi tersebut diperlukan pelatihan maupun pendampingan. Pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri dengan profesional pendamping desa sebagai variabel moderasi. Faktor-faktor tersebut adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Penerapan Siskeudes, dan Pendamping Desa yang Profesional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sekretaris desa atau petugas keuangan desa di Kabupaten Kediri. Survei dilakukan

terhadap 100 responden di 100 desa dari 343 desa di Kabupaten Kediri. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes), dan tenaga pendamping desa yang profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (KLKPD). Pendamping desa yang profesional dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan penerapan Siskeudes terhadap KLKPD.

**Kata Kunci:** Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Pendamping Desa yang Profesional, Laporan Keuangan Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas, mendapat perhatian serius dari pemerintah (Simanjuntak et al., 2022). Pemerintah membenahi, mendorong, mengembangkan eksistensi dan potensi Desa, dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), diharapkan setiap desa harus bisa bertransformasi menjadi Desa yang mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran langsung ke Desa, sehingga diperlukan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran tersebut berupa Laporan Keuangan Desa (Maharani & Akbar, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan yaitu berupa Laporan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, 2014).

Siklus pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. (Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengisyaratkan bahwa Desa harus melakukan Akuntansi Desa. Laporan keuangan juga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang handal dan dapat dipercaya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

UU Desa mewajibkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah pusat menugaskan BPKP mengembangkan sebuah aplikasi Siskeudes sebagai alat untuk membantu desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa (Maharani & Akbar, 2020).

Siskeudes merupakan aplikasi yang baru, selama ini pengelolaan dana desa belum pernah menggunakan suatu aplikasi yang terpadu. Pengoperasian aplikasi tersebut diperlukan pelatihan maupun pendampingan. Pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Simanjuntak et al., 2022).

**Tabel 1.** Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

<b>Realisasi Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah)</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2.1. Dana Desa	67,263,189,002	72,418,847,214	71,851,623,016
2.2. Bagi Hasil Pajak	3,564,506,942	3,369,079,152	3,484,466,194
2.3. Alokasi Dana Desa	35,229,327,941	35,986,874,469	35,501,821,405

Sumber: BPS, 2021

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Demokrasi, Akuntabilitas, Budaya Hukum, Kewajaran, Kompetensi Aparatur Pemerintah (Yuliani & Agustini, 2016), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Satuan Pengawasan Internal Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi (Widayati & Abdurahim, 2022), Kepatuhan Regulasi, Siskeudes, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi (Gayatri & Latrini, 2018) (Adhitama et al., 2019). Variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

adalah: Peran Internal Audit (Goo et al., 2019). Sedangkan variabel-variabel yang menunjukkan hasil yang berbeda adalah; Transparansi, Kompetensi Aparatur Pemerintahan, Teknologi Informasi, Satuan Pengawasan Internal, (Adhitama et al., 2019) (Andari et al., 2022) (Nurdin & Wijaya, 2018) (Sutrepti et al., 2022).

Adanya keterlambatan pelaporan dana desa oleh ratusan desa di Kabupaten Kediri belum bisa mencairkan dana desa (DD) tahap III (Rekian, 2022). Siskeudes merupakan system baru, oleh karena itu masih banyak hambatan, khususnya dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berkualitas (Tinggi et al., 2022) (Ningsih et al., 2022).

Berdasarkan fenomena dan riset gap tersebut peneliti mengambil faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Sehingga identifikasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi KLKPD yang terdiri dari : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menyusun laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, penerapan aplikasi Siskeudes akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan desa (Adillah et al., 2021), Peran pendamping desa (PPD) yang efektif meningkatkan kualitas laporan keuangan (Trisnadewi et al., 2020). Lokasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Periode tahun 2023.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)**

### ***Stakeholder Theory***

Teori pemangku kepentingan diperkenalkan pertama oleh Freeman (1994). Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungannya sendiri tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat, seperti kreditor, supplier, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan (Handoko, 2021). Pada organisasi pemerintahan, rakyat sebagai pemangku kepentingan perlu mendukung program-program kerja pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar tercapai dalam mewujudkan *Good Government Governance* (GGG) (Tullah et al., 2018), pemerintah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah, sebagai ekstensi dari pemerintah pusat, harus mengkomunikasikan prestasi dan kinerja keuangan secara rinci dan komprehensif untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi mandat yang diberikan oleh masyarakat. Dengan menyajikan laporan keuangan dengan baik, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas mereka di mata publik. (Tinggi et al., 2022).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan mencakup aspek keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran hingga implementasi dan pelaporan hasilnya, di semua organisasi pemerintahan. PP No. 24 tahun 2005 jo PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pembaruannya mengenai penggunaan basis akrual secara penuh untuk akuntansi pemerintahan baik yang berlaku di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penetapan aturan ini menjadi tonggak sejarah diterapkannya basis akuntansi akrual di Indonesia (Bondan S. et al., 2017).

### **Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa**

Laporan keuangan desa adalah sebuah konsep yang lebih aman dan berakuntabilitas dari pada berbagai jenis laporan bukan akuntansi. Laporan keuangan desa sejalan dengan euforia pembangunan desa digital di berbagai kabupaten di Indonesia (Hoesada Jan, 2019). Keuangan desa merujuk pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat diukur dan diestimasi baik dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) terdiri dari tiga bagian utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan dua kali setahun oleh Kepala Desa kepada bupati atau walikota, yaitu paling lambat bulan Juli dalam tahun yang berlangsung dan bulan Januari tahun berikutnya. (Peraturan Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, 2014).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2016 telah menerbitkan Konsep Publikasian mengenai Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, namun sampai dengan saat ini Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa tersebut belum ditetapkan sebagai pedoman/standar resmi dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2010, disebutkan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kuantitatif yaitu:

#### **a. Relevan**

Laporan keuangan yang relevan adalah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi evaluasi mereka di masa lalu.

#### **b. Andal**

Laporan keuangan yang andal jika informasi yang terkandung dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

#### **c. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. Perbandingan dapat meliputi perbandingan internal dan perbandingan eksternal.

#### **d. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemahaman akuntansi merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses akuntansi, dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan keuangan yang akurat, sesuai dengan prinsip dan standar yang diatur dalam [Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010](#) tentang SAP. (Andari et al., 2022). Komite SAP (2010) mengemukakan bahwa indikator pemahaman akuntansi meliputi :

1. Penyusunan laporan keuangan memerlukan pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi.
2. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan.

Tingkat Pemahaman Akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai tingkat pemahaman akuntansi yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Andari et al., 2022).

### **Aplikasi Siskeudes**

Aplikasi Siskeudes dibuat sebagai salah satu implementasi dari [UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat \(4\) huruf \(f\)](#) menyebutkan bahwa: Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip tata kelola desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efektivitas, efisiensi, kebersihan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang yang mengamankan tata kelola desa yang bertanggung jawab.

Efisiensi dalam kinerja pemerintah desa diperlukan untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah desa. Selain aspek pengelolaan keuangan desa, efektivitas kinerja pemerintah desa juga terlihat dari kinerja organisasi pemerintah desa itu sendiri. Penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta memungkinkan pemantauan transaksi yang dilakukan (Fauziah & Hermawan, 2022).

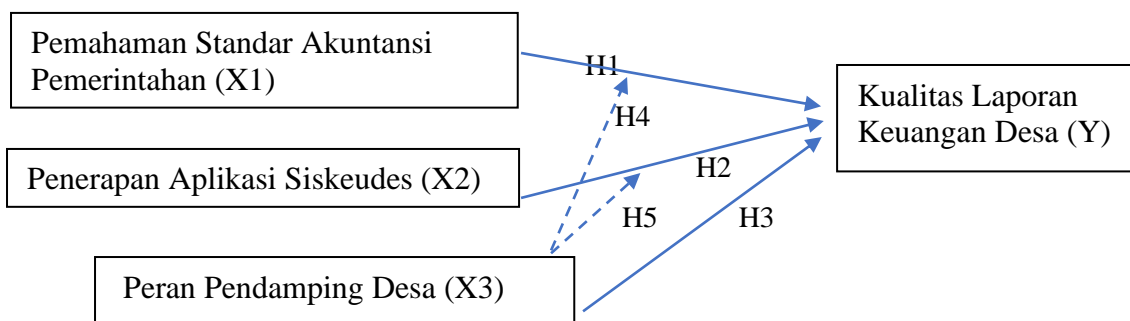
Siskeudes menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penghematan biaya dan waktu serta mengeliminasi potensi kesalahan manusia, kecurangan dan membantu pengumpulan data. Selain kemudahan penggunaan, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pengendalian internal bawaan serta didukung oleh panduan implementasi dan manual aplikasi. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes setelah data dimasukkan (Ta'dung, 2023).

### Peran Pendamping Desa

Siskeudes merupakan aplikasi yang baru, agar pengoperasian aplikasi tersebut sesuai sasaran diperlukan berbagai upaya baik berupa pelatihan maupun pendampingan. Dalam upaya keberhasilan dalam menerapkan aplikasi Siskeudes pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Proses penerapan Siskeudes diawali dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasangan aplikasi di komputer perangkat desa, kemudian dilanjutkan praktek langsung terhadap transaksi yang ada di Desa (Julianto & Dewi, 2019).

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah, telah pustaka, penelitian terdahulu, serta riset gap di atas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah:



### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap KLKPD

Tingkat pemahaman akuntansi mengacu pada seberapa baik seseorang memahami konsep-konsep akuntansi, baik sebagai pengetahuan umum maupun sebagai kemampuan yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan KLKPD (Andari et al., 2022), berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap KLKPD.

#### Pengaruh Penerapan Aplikasi Siskeudes Terhadap KLKPD

Penerapan aplikasi Siskeudes meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa, KLKPD, melalui peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan keuangan desa secara lebih transparan dan sistematis (Fauziah & Hermawan, 2022). Berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 2 sebagai berikut:

H2: Penerapan aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap KLKPD.

#### Pengaruh PPD Terhadap KLKPD

Dalam upaya keberhasilan dalam menerapkan aplikasi Siskeudes pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Proses implementasi Siskeudes diawali dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasangan aplikasi di komputer perangkat desa, kemudian dilanjutkan praktek langsung terhadap transaksi yang ada di Desa (Julianto & Dewi, 2019), berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: PPD berpengaruh terhadap KLKPD.

### **PPD Memoderasi Hubungan Antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

PPD adalah memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pedoman/standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan daerah/desa, Jika aparat desa bisa memahami pedoman/standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas, berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 4 sebagai berikut:

H4: PPD memoderasi hubungan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **PPD memoderasi hubungan antara Penerapan aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD**

PPD di dalam penerapan Siskeudes adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap desa, keberhasilan implementasi Siskeudes diperlukan peran petugas yang memberi pemahaman terhadap perubahan-perubahan sistem dalam tata kelola desa, diperlukan tahapan untuk mentransformasikan cara kerja Siskeudes kepada aparat desa. Maka PPD sangat penting dalam penerapan Siskeudes sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas, berdasarkan uraian tersebut dikembangkanlah Hipotesis 5 sebagai berikut:

H5: PPD memoderasi hubungan antara Penerapan aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, tersusun dari awal hingga akhir penelitian, dan cenderung menggunakan analisis angka-angka statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021).

Populasi penelitian ini adalah seluruh Desa di wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur yang memiliki 343 desa. Responden dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa atau Kaur Keuangan Desa, pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin:

Dimana  $n$  adalah ukuran sampel yang akan dicari,  $N$  adalah ukuran populasi dan  $e$  adalah *margin of error* yang merupakan besaran kesalahan yang ditetapkan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis secara terstruktur berkaitan dengan variabel yang digunakan, kuesioner diberikan kepada Sekretaris Desa atau Kaur Keuangan Desa. Skala likert dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat pada kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini mengambil referensi dari variabel penelitian-penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya telah diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi sehingga telah teruji secara akademis, dilakukan pengembangan serta modifikasi oleh peneliti atas pertanyaan-pertanyaan tersebut karena disesuaikan dengan indikator pengukuran variabel, agar tercapai suatu variabel bisa diinterpretasikan secara pas dan jelas, serta disesuaikan kondisi lapangan responden.

### **Metode Analisis**

Diskripsi statistik adalah statistik yang mengumpulkan informasi dalam bentuk deskripsi.

### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menguji item indikator dalam kuesioner yang merepresentasikan konstruk laten valid atau tidak. Suatu indikator dikatakan valid jika indikator pada kuesioner bisa digunakan untuk mengukur konstruk laten. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- *Construct validity* yaitu mengukur konsep/*construct* suatu laten, hal ini merupakan definisi operasional.

- *Predictive validity* yaitu mengukur pengukuran atas instrument itu sendiri.
- *Content validity* yaitu mengukur konstruk sebelum dan sesudah dibentuk untuk menguji validitas internal dan *statistical* (Ghozali, 2020, 74-75).

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk menguji indikator dari suatu kuesioner yang merupakan instrument yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang akurat. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji *internal consistency reliability* adalah *Cronbach alpha* (Ghozali, 2020, 75).

### Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode SEM dengan software WarpPLS 7.0. Analisis model struktural dalam SEM-PLS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Model pengukuran (*Outer Model*)
- Model Struktural (*Inner Model*)
- Uji Hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pamong desa terutama Sekretaris Desa atau Kaur Keuangan Desa, hal ini karena pamong desa tersebut yang mengerti pengelolaan desa secara menyeluruh dan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan tata kelola desa. Populasi penelitian ini sejumlah Desa yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 343, pengambilan sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* yaitu untuk menghitung banyaknya sampel minimum suatu survei populasi terbatas. Dengan rumus ini maka jumlah sampel diperoleh minimal adalah:

$$n = 343 / 1 + 343 \times 10\% ^2 = 77,4$$

Jangka waktu penyebaran kuesioner tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2023, dengan cara yaitu: selebaran cetakan/*hardcopy* kuesioner serta *google form*. Diperoleh responden sebanyak 100 yang tersebar merata di seluruh Wilayah Kabupaten Kediri. Data karakteristik responden sebagai berikut:

**Tabel 2.** Profil Responden

Kriteria	Kategori	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	61	61%
	Perempuan	39	39%
Usia	15 - 30 Tahun	34	34%
	31 - 50 Tahun	65	65%
	> 50 Tahun	1	1%
Tingkat Pendidikan	SMA/Sederajat	27	27%
	D1 - D3	10	10%
	S1	58	58%
Jabatan	S2	5	5%
	Sekretaris desa	92	92%
	Kaur Keuangan	7	7%
Masa Kerja	Lainnya	1	1%
	1 - 2 Tahun	18	18%
	3 - 4 Tahun	61	61%
	> 5 Tahun	21	21%

Sumber : Data primer diolah,

**Analisa SEM-PLS****Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)****Tabel 3. Skor *Outer Loading*, AVE, CA, CR**

Konstruk	Indikator	<i>Outer Loading</i>	AVE	CR	CA
KLKD	KLKD1	0.719	0.516	0.864	0.812
	KLKD2	0.701			
	KLKD3	0.656			
	KLKD5	0.690			
	KLKD6	0.805			
PSAP	KLKD7	0.729	0.657	0.939	0.925
	PSAP1	0.724			
	PSAP2	0.741			
	PSAP3	0.823			
	PSAP4	0.803			
	PSAP5	0.846			
	PSAP6	0.888			
	PSAP7	0.807			
PSKD	PSAP8	0.840	0.681	0.937	0.92
	PSKD1	0.763			
	PSKD2	0.846			
	PSKD3	0.865			
	PSKD4	0.699			
	PSKD5	0.835			
	PSKD6	0.868			
PPD	PSKD7	0.877	0.736	0.951	0.94
	PPD1	0.758			
	PPD3	0.874			
	PPD4	0.864			
	PPD5	0.848			
	PPD6	0.898			
	PPD7	0.890			
	PPD8	0.862			

Sumber : Data primer diolah,

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator dapat dinyatakan valid atau sudah memenuhi, sebab ada 3 indikator bernilai loading faktor 0,6 sampai 0,7 ini tetap diperhankan dalam konstruk penelitian karena memiliki P value < 0,001.

Berikutnya uji *Discriminant Validity* dari model dinai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Korelasi konstruk dengan item lebih besar, maka menunjukkan konstruk laten memprediksi blok lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

**Tabel 4. Loading dan Cross Loading pada SEM-PLS**

Indikator	KLKD	PSAP	PSKD	PPD
KLKD1	0.719	0.446	0.475	0.482
KLKD2	0.701	0.475	0.368	0.399
KLKD3	0.656	0.400	0.178	0.188
KLKD5	0.690	0.390	0.315	0.319



KLKD6	0.805	0.516	0.406	0.297
KLKD7	0.729	0.462	0.258	0.221
PSAP1	0.457	0.724	0.512	0.400
PSAP2	0.441	0.741	0.474	0.346
PSAP3	0.517	0.823	0.568	0.582
PSAP4	0.497	0.803	0.397	0.344
PSAP5	0.580	0.846	0.536	0.498
PSAP6	0.553	0.888	0.668	0.583
PSAP7	0.496	0.807	0.589	0.542
PSAP8	0.511	0.840	0.610	0.572
PSKD1	0.427	0.505	0.763	0.313
PSKD2	0.411	0.588	0.846	0.533
PSKD3	0.378	0.490	0.865	0.554
PSKD4	0.371	0.392	0.699	0.271
PSKD5	0.392	0.597	0.835	0.502
PSKD6	0.333	0.626	0.868	0.489
PSKD7	0.407	0.671	0.877	0.512
PPD1	0.315	0.460	0.405	0.758
PPD3	0.346	0.505	0.456	0.874
PPD4	0.405	0.533	0.520	0.864
PPD5	0.274	0.468	0.374	0.848
PPD6	0.408	0.580	0.510	0.898
PPD7	0.475	0.552	0.500	0.890
PPD8	0.417	0.487	0.499	0.862

Sumber : Data primer diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa indicator adalah valid. Loading factor melebihi cross loading factor.

**Tabel 5.** *Discriminant Validity* pada SEM-PLS tahap II

	KLKD	PSAP	PSKD	PPD
KLKD	0.718			
PSAP	0.628	0.811		
PSKD	0.475	0.673	0.824	
PPD	0.451	0.601	0.551	0.857

Sumber : data primer, diolah

Tabel 4 dan Tabel 5, menunjukkan bahwa semua nilai setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dan konstruk lainnya. Sehingga dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam model yang diestimasi telah memenuhi kriteria uji *Discriminant Validity*.

### Hasil Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model struktural (*inner model*) yang evaluasi untuk melihat model struktural yang dibangun telah benar serta untuk menguji model atau kerangka konsep yang dilakukan dalam penelitian. Evaluasi *inner model* dapat dilihat dari koefisien determinan ( $R^2$ ), *predictive relevance* ( $Q^2$ ), *Goodness Fit Index* (GoF) (Ghozali, 2020,80-88).

Dimulai dengan melihat nilai  $R^2$  setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Kemudian dilakukan test untuk menguji *predictive relevance* ( $Q^2$ ), *Goodness Fit Index* (GoF) untuk mengukur fit model secara keseluruhan. Namun  $R^2$  bisa menyebabkan bias jika semakin banyak predictor variabel dalam model, untuk mengatasi disarankan menggunakan *Shrunken* atau *Adjusted R<sup>2</sup>* yang pada software WarpPLS 7.0 ini outputnya sudah ditambahkan. Nilai  $R^2$  atau *Adjusted R<sup>2</sup>* 0.70 , 0.45 , 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah. Batas

maksimal untuk nilai PLS ini adalah 0.70, jika lebih besar kemungkinan model mengalami problem *collinearity* (Ghozali, 2020,80).

### Hasil Uji Hipotesis

**Tabel 6.** Koefisien Jalur

	Path Coefficients	P-value	Hasil
PSAP --> KLKD	0.362	<0.001	Signifikan
PSKD --> KLKD	0.201	0.018	Signifikan
PPD --> KLKD	0.208	0.015	Signifikan
PPD*PSAP --> KLKD	-0.171	0.038	Signifikan
PPD*PSKD --> KLKD	-0.162	0.046	Signifikan

Sumber: Data primer diolah,

### PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis alternatif pertama menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap KLKPD. Hal ini sesuai teori hipotesis pertama, yaitu Tingkat Pemahaman Akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai tingkat pemahaman akuntansi yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Andari et al., 2022).

Ditinjau dari sudut pandang usia dan pendidikan, tingkat pemahaman dipengaruhi oleh usia dan latar belakang pendidikan, pada penelitian ini usia responden hampir 100 persen di usia yang masih produktif yaitu dibawah 50 tahun, usia produktif ini merupakan masa dimana seseorang memiliki kemampuan memahami suatu hal dengan baik. Sedangkan dari sisi latar pendidikan responden memiliki Pendidikan yang cukup tinggi sebanyak 78% adalah D1 sampai dengan S-1 sehingga dengan pendidikan yang cukup tinggi ini responden bisa memahami Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik.

Hasil penelitian ini juga masih selaras seperti yang di sebutkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010) indikator dari pemahaman akuntansi adalah:

1. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi. Paham terhadap komponen-komponen laporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu keharusan seseorang dalam menyusun laporan keuangan.
2. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Orang yang akan menyusun suatu laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan.

Disamping itu, tingkat pemahaman mengenai pedoman-pedoman teknis pelaporan keuangan atau yang di sebut Standar Akuntansi Pemerintah tersebut, sejalan dengan hasil pengujian mengenai PPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan, selain responden yang berada pada usia produktif serta memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dilengkapi dengan tambahan edukasi yang intensif oleh Pendamping Desa terhadap pedoman teknis dan SAP akan menambah lengkap pemahaman responden mengenai SAP tersebut.

Dilihat dari sudut pandang pelatihan responden, hasil penelitian ini sangat selaras, hampir seluruh responden telah mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan desa termasuk pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini terlihat pemerintah sangat menaruh perhatian dalam mendorong tercapainya transformasi pembangunan desa yaitu pembangunan desa secara mandiri dalam rangka menyukseskan dan menerapkan UU Desa. Dengan pelatihan mengenai Sistem Keuangan Desa yang telah didapatkan aparat desa ini merupakan modal *soft skill* atau aset SDM yang sangat mendukung entitas dalam menerbitkan laporan keuangan desa yang berkualitas.

Hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga PPD berpengaruh terhadap KLKPD. Hal ini selaras dengan teori hipotesis. Dalam upaya keberhasilan dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes pemerintah juga memberikan pendampingan desa yang saat ini disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Proses implementasi Siskeudes diawali dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasangan aplikasi di komputer perangkat desa, kemudian dilanjutkan praktek langsung terhadap transaksi yang ada di Desa (Julianto & Dewi, 2019). Pemerintah sangat tepat mengambil langkah dan mengantisipasi

perubahan/transformatasi pembangunan desa ini. Suatu kebijakan baru akan memerlukan penggerak, pendorong, penyalaras, penyemangat dalam tugasnya mendampingi desa-desa dalam melaksanakan perubahan tersebut.

Hasil pengujian hipotesis alternatif keempat PPD memoderasi pengaruh antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap KLKPD. Sementara dalam teori hipotesis dikatakan PPD adalah memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai pedoman/standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan daerah/desa, Jika aparatur desa bisa memahami pedoman/standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas. Keberhasilan aparat desa memahami Standar Akuntansi Pemerintahan selain disebabkan oleh faktor internal personal seperti yang telah dijelaskan dalam uji hipotesis pertama yaitu usia yang produktif serta latar belakang yang cukup tinggi, tentunya faktor Pendamping Desa juga memiliki peran melengkapi kesempurnaan aparat desa dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang baik.

Hasil pengujian hipotesis alternatif kelima PPD memoderasi pengaruh Penerapan Aplikasi Siskeudes terhadap KLKPD. Sementara dalam teori hipotesis dikemukakan PPD di dalam implementasi Siskeudes adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap desa, keberhasilan implementasi Siskeudes diperlukan peran petugas yang memberi pemahaman terhadap perubahan-perubahan sistem dalam tata kelola desa. Siskeudes merupakan perangkat lunak yang bekerja secara online dan terintegrasi, diperlukan tahapan yang cukup untuk mentransformasikan cara kerja Siskeudes kepada aparat desan yang belum pernah menjalan Siskeudes dari awal sampai menjadi laporan keuangan desa. Disinilah PPD sangat penting dalam implementasi Siskeudes sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas. Seperti yang telah dijelaskan dalam hasil uji hipotesis kedua yaitu aparat desa telah mendapat pelatihan yang memadai terhadap pengelolaan desa termasuk pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini peran pendamping masih cukup relevan dalam memperdalam aparat desa dalam menjalankan aplikasi Siskeudes. Tentunya dalam praktek sehari-hari dijumpai permasalahan-permasalahan atau hal-hal lain diluar materi pelatihan, disinilah PPD memberikan solusi. Setiap desa akan menghadapi permasalahan yang bervariasi, disini pendamping desa dituntut memiliki pengetahuan yang luas, tangguh dan konsisten .

## **KESIMPULAN**

KLKPD sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintahan Desa kepada stakeholdernya. Dapat disimpulkan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Desa diperlukan hal-hal sebagai berikut :

Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai [PP 71 tahun 2010](#), dengan memahami SAP yang baik Pemerintahan Desa dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel.

Aplikasi Siskeudes merupakan hal baru bagi Desa, dengan memahami, mengenal dan menjalan yang baik akan membantu Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien.

Diperlukan suatu proses pengajaran sekaligus penggerak kepada aparat yang terkait di Desa agar bisa menghasilkan Laporan Keuangan Desa. Proses transformasi ini dilakukan oleh Pendamping Desa.

## **SARAN**

Peneliti memberi beberapa saran:

- a. Agar segera ditetapkan Standar Pelaporan Keuangan Desa seperti yang sudah diedarkan tapi masih dalam bentuk Exposure Draft
- b. Penelitian ini bisa dilakukan di wilayah Indonesia lainnya, agar tercapai tujuan pemerintah dalam mentransformasi pembangunan berbasis Desa.
- c. Bagi penelitian selanjutnya agar memperbanyak populasi penelitian serta menambah/memperluas variabel yang mungkin mempengaruhi KLKPD seperti: Peran adanya website Bimbingan Teknis (Bimtek).

## IMPLIKASI DAN BATASAN

### Implikasi

Dalam upaya peningkatan KLKPD di seluruh Indonesia berdasar UU Desa, diperlukan beberapa hal seperti: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengawasan Internal, Konsistensi, agar pengelolaan dana desa bisa lebih efektif dalam mendukung Pembangunan desa.

### Batasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

- a. Data diperoleh dari kuesioner tertutup dari responden, sehingga jawaban bersifat subjektif berdasarkan kondisi dan pengetahuan responden.
- b. Penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Kediri Jawa Timur.
- c. Data responden diperoleh pada bulan Juli 2023, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat pengambilan sampel.

## REFERENSI

- Adhitama, P. P., Suratno, & Edy, S. (2019). Analisis Determinan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Ekobisman*, 3(2). Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/285>
- Adillah, R., Apriadi, A., & Muhammad, R. N. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Penerapan Siskeudes terhadap Kualitas Laporan Dana Desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 261–270. Retrieved from <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2445>
- Andari, T., Novitasari, G., & Dewi, S. (2022). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kec. BlahBatuh. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4, 180–189. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4858>
- Bondan S., Y. P., Djahmuri, A., & Rosidi, R. (2017). Kapabilitas Dinamis, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kediri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2). <https://doi.org/10.9744/jak.19.2.82-101>
- BPS, S. S. K. P. D. (2021). *Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia [Format Baru] (Ribu Rupiah), 2019-2021*. Biro Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1977/1/realisasi-penerimaan-dan-pengeluaran-pemerintah-desa-seluruh-indonesia-format-baru-.html>
- Fauziah, N., & Hermawan, S. (2022). Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) to Improve Village Financial Management Accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13. <https://doi.org/10.21070/ijccd2022788>
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>
- Ghozali, I. (2020). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Warp PLS 7.0* (4th ed.). Badan Penerbit - Undip.
- Goo, K. M. G., Mulyadi, J., & Syam, M. A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Ende. *Ekobisman*. Retrieved from <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/1022>
- Handoko, B. L. (2021). *Stakeholder Theory dan Hubungannya dengan Sustainability Report – Accounting*. Binus University. Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2021/07/13/stakeholder-theory-dan-hubungannya-dengan-sustainability-report/>

- Hasibuan, R. A., Junita, A., & Azhar, I. (2021). Determinan Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa dengan Peran Pendamping Desa sebagai Pemoderasi (Studi pada desa se Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(5).
- Hoesada Jan. (2019). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Husin, A. El. (2014, May 23). *Kunjungan Konsultasi DPRD Kabupaten Kediri ke BPKP*. Retrieved from <https://www.bpkp.go.id/sakd/berita/read/12441/0/Kunjungan-Konsultasi-DPRD-Kabupaten-Kediri-ke-BPKP.bpkp>
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jia (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/Jia.V4i1.17242>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20, BNRI (2018). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pub. L. No. 263/PMK.05/214, BNRI (2014).
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1). Retrieved from <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/253>
- Nafi'ah, N. K., & Prihatiningtias, Y. W. (2018). *Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur*. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4689>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2018). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Universitas Fajar*. Retrieved from <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos/article/view/106>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, BNRI (2010). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Rekian. (2022, September 29). *Laporan hambat raturan desa di Kabupaten Kediri | Radar Kediri*. Radarkediri.Jawapos.Com/Politik-Pemerintahan. Retrieved from <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/29/09/2022/laporan-hambat-raturan-desa-di-kabupaten-kediri/>
- Simanjuntak, V., Setiawati, L., & Werimon, S. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 84–97. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4350>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta CV.
- Sutrepti, N. L. P. A., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
- Ta'dung, Y. L. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Lembang Rantebua, Kecamatan Rantebua Toraja Utara. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(1), 35–40. Retrieved from <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JKB/article/view/125>
- Tinggi, S., Ekonomi, I., Sibolga, A.-W., Keuangan, P., Desa, D., Kecamatan, B., & Faizah, D. A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V5I1.539>

- Trisnadewi, Aaae., Amlayasa, Aab., & Wayan Rupa, I. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Siskeudes dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.37-52>
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Sip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>
- Umayah, I., Arisyahidin, & Mutiara, N. (2022). Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Kediri. *Otonomi* , 22(1).
- Widayati, W., & Abdurahim, A. (2022). Determinan yang Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Gunungkidul. *Ratio : Review Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(2). Retrieved from <http://jurnalnasional ump.ac.id/index.php/REVIU>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Factors Affecting The Quality Of Local Government Financial Statements Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64. Retrieved from <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/124>